

# DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN



Foto Google



## Peran Perempuan Difabel dalam Masyarakat

ma  
na  
cash



Sapda  
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak

### DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA ( Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak )

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani, SH. Pimpinan Redaksi Totok Rawi Djati. Dewan Redaksi. Tari, Miko, Tri Lestari, Iik. Sekertaris Redaksi. Iik. Redaktur Pelaksana. Totok Rawi Djati, Tri Lestari, Made, Juju Juliati. Litbang Made, Tri Lestari. Layout Totok. Produksi/ Sirkulasi. Tri Lestari, Iik, Made, Tari, Juju Juliati. Alamat Redaksi Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066  
Web : [www.sapdajogja.org](http://www.sapdajogja.org)

## JANGAN SEPELEKAN PEREMPUAN DIFABEL!!!!

Dalam satu dekade terakhir isu perempuan seolah menjadi bintang dalam upaya peningkatan peran dalam kehidupan sosial yang selama ini masih di tempatkan dalam subordinat dari peran laki-laki. Hal tersebut tidak lepas dari konstruksi sosial yang selama ini terbangun didalam masyarakat juga struktur budaya yang sering kali menciptakan perbedaan kapasitas antara laki-laki dan perempuan. Kondisi riil di masyarakat menunjukkan masih banyaknya perempuan apalagi difabel yang hidup di bawah garis kemiskinan yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Gambaran paling mudah adalah dua dari delapan orang Indonesia dikategorikan sebagai miskin. Karena, dengan total jumlah penduduk di Indonesia sebesar 237 juta jiwa di tahun 2010 namun menginjak tahun 2012 kepadatan penduduk di Indonesia semakin bertambah sekitar 257, termasuk di dalamnya penduduk miskin sebanyak 30,5 juta jiwa, maka benarlah jika dikatakan bahwa satu dari delapan penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Di tengah-tengah kondisi yang demikian yang paling dirugikan adalah kelompok-kelompok minoritas yang termarginal salah satunya adalah kelompok difabel yang secara sosial masih dililit persoalan stigma negative di dalam masyarakat terlebih lagi bagi perempuan difabel yang harus mengalami diskriminasi bukan lagi ganda tapi triple yaitu sebagai seorang perempuan, miskin sekaligus difabel.

Namun dalam satu dekade terakhir peran perempuan difabel dalam mensosialisasikan, mengadvokasi hak-hak difabel begitu menonjol, begitu banyak lembaga yang di motori oleh pendekar perempuan difabel seperti di Solo ada Pamikatsih direktur Interaksi, di Jogja ada Nuning direktur CIOAL, Nurul direktur SAPDA, Risna Direktur UCP UPRUK di Bandung ada Cucu direktur BILIC Bandung, Mimi direktur Mimi Institut Jakarta, Di Jawa Timur ada Wuri yang mendobrak ketidakadilan atas haknya untuk bekerja selain itu banyak tokoh perempuan difabel yang hampir separuh hidup mereka diabdikan untuk memperjuangkan hak-hak difabel.

Dampak dari peran perempuan difabelpun kini bisa dinikmati oleh difabel yang lain yang tentunya tidak mengesampingkan peran difabel laki-laki, seperti di Jogja yang difabel memperoleh Jaminan Kesehatan melalui Jamkesmas Propinsi Jogja dan kemudahan memperoleh kursi roda yang adaptif bahkan hal ini tidak hanya untuk Jogja dan Jawa tengah namun sudah sampai luar Jawa, di Solo Raya isu difabilitas begitu populer di masyarakat dan terutama di Kabupaten/kota. Di Bandung maupun Jakarta kesadaran akan kebutuhan aksesibilitas di fasilitas umum semakin tinggi bagi stakeholder. Saat ini pula perempuan difabel di gross root mulai bangkit menunjukkan partisipasinya dalam membangun kesadaran bahkan melakukan advokasi atas hak mereka, setelah beberapa lama mereka tidak berdaya menghadapi stigma negative yang ditujukan kepada mereka. Saat ini di kabupaten Sukoharjo ada beberapa Perempuan yang menjadi ketua Kelompok Usaha Bersama ( KUBE) anatara lain ; Suyanti KUBE Alaska Sejahtera kecamatan Polokarto, Sajiyem KUBE Warna Sari kecamatan Baki dan di Tanggung ada Wiji Lestari ketua KUBE Lestari.

Namun, perlu dicermati pula pola partisipasi yang telah terlaksana. Idealnya, pola partisipasi perempuan adalah partisipasi aktif, bukan partisipasi semu tanpa peran yang jelas dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Karena, angka partisipasi perempuan yang tinggi tentu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kedifabelan, khususnya perempuan difabel, jika partisipasi tersebut hanyalah sebagai pelengkap dan pemanis program semata. Kalau memang sebagai program pemberdayaan difabel, maka perlu dipetakan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas partisipasi aktif perempuan, khususnya keluarga difabel dan perempuan yang dikategorikan sebagai keluarga miskin. Sehingga difabel dan komunitas perempuan difabel tidak diperlakukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku utama (subjek) penanggulangan kedifabelan itu sendiri.

Ditinjau dari segi sosiografis perempuan Indonesia, terdapat banyak faktor yang sangat kuat menyekat peran kaum pria dan kaum perempuan dalam ranah public apalagi perempuan difabel. Lebih khusus lagi, jika ditilik dari sisi kedifabelan dan pembagian peran sosialnya, perempuan difabel di Indonesia cenderung memiliki kesempatan yang terbatas untuk menolong dirinya sendiri keluar dari kungkungan stigma negative dan kedifabelan. Kesibukan para perempuan dalam urusan domestik misalnya, menyebabkan mereka tidak leluasa untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak difabel bahkan sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan perempuan difabel yang memegang peran ganda dalam rumah tangga, hal ini banyak dialami oleh perempuan difabel korban gempa tahun 2005. Selain bertanggung jawab terhadap urusan domestik rumah tangga, perempuan difabel juga "terpaksa" bekerja untuk menambah penghasilan. Sedangkan perempuan difabel yang menjadi penanggung jawab domestik saja, hampir dipastikan tidak memiliki asisten rumah tangga. Hal ini menyebabkan waktu mereka terkuras dalam urusan domestiknya. Karena itu mungkin perlu dipertimbangkan perlunya forum informal yang khusus untuk perempuan difabel itu sendiri. Selain itu, warga difabel khususnya perempuan telah disibukkan dengan urusan pemenuhan ekonomi, sehingga waktu yang digunakan untuk berpartisipasi dapat mengurangi potensi penghasilan sehari-hari. Hal ini tentu dapat diterima, karena bagaimanapun kondisi perekonomian warga difabel, khususnya perempuan, menumbuhkan pola pikir yang pragmatis. Hal tersebut diperparah dengan kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung merasa pendapatnya tidak pernah diakomodir akibat budaya dominasi pria dalam pengambilan keputusan rumah tangga, yang cenderung terbawa dalam ruang publik seperti pemberdayaan difabel.....

KE HAL : 6

## Peran organisasi perempuan difabel

Tidak bisa dipungkiri dampak gempa tahun 2005 sampai sekarang masih ada yang belum bisa hilang dari ingatan, khususnya korban yang menjadi difabel. Mereka menjalani proses yang panjang untuk penerimaan diri sampai bisa kembali beraktifitas sebagaimana sebelum bencana tersebut. Tidak sedikit dari mereka masih usia produktif, selain laki-laki banyak juga perempuan yang menjadi cacat permanen. Banyak perempuan yang dulunya juga jadi tulang punggung keluarga, dan setelah jadi difabel tetap saja berusaha bisa membantu ekonomi keluarga dengan kemampuan yang ada apalagi bagi mereka yang ditinggal suami yang menjadi korban gempa. Dan keberadaan perempuan difabel eks gempa yang tersebar diberbagai wilayah sehingga seringkali luput dari perhatian, terkadang terdeteksi setelah dalam kondisi parah dengan dekubitus maupun sudah mengalami KDRT.

Tergerak oleh kondisi tersebut pada tahun 2010 SAPDA mencoba mengasesment dan mengorganisir perempuan difabel korban gempa di dua 2 Kecamatan yaitu Jetis dan Bambanglipuro dengan membentuk kelompok yang bertujuan meningkatkan motivasi dan kemampuan perempuan difabel untuk kembali beraktifitas di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan organisasi ternyata bermanfaat bagi sebagai sarana tempat mereka sharing masalah dan mencari solusi, bisa mengakses informasi program dari pemerintah atau pihak lain juga bisa tahu kondisi teman yang lain. Selain itu dengan berkelompok akan semakin mudah mengakses permodalan baik hibah ataupun pinjaman lunak, karena dengan berkelompok tanggungan semakin ringan daripada perseorangan, proses juga lebih dipermudah. Mereka bisa buka usaha kelompok, antar teman membantu pemasarannya. Dalam pertemuan sebulan sekali selain sharing informasi juga diadakan kegiatan simpan pinjam untuk membantu anggota mendapat modal usaha atau menutup biaya keluarga. Manfaat lain diantaranya :

### 1. Kelompok perempuan difabel Bambanglipuro.

#### 1. Sarana Rehabilitasi mental dan Psikologis :

Dari beberapa anggotanya yang dulu tidak pernah keluar rumah untuk bekerja atau sekedar bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat sekitar sekarang sudah mau keluar rumah bergabung dengan kelompok, ikut kembali kegiatan kampung misalnya dasawisma, PKK, melayat, ke hajatan tetangga. Sebelum ada organisasi merasa sendiri dan minder untuk bergaul tapi setelah bergabung dengan kelompok, berani berpendapat di pertemuan kelompok, maupun lingkungan, tidak jadi beban keluarga lagi tapi malah bisa membantu keluarga. Dengan kendaraan yang aksesibel mereka bisa kemana-mana sendiri termotivasi bisa kumpul dengan teman senasib. Dari segi ekonomi, sudah ada yang kembali ke pasar untuk berjualan seperti sebelum jadi difabel, yang sebelumnya hanya dirumah karena malu menjadi difabel yang membebani keluarga, setelah berkumpul teman dan keluarga ibu tersebut kembali usaha kecil-kecilan, awalnya keluarga yang menjual dipasar (ditiitip) sekarang sudah berjualan sendiri dipasar.

### 2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

Dua organisasi perempuan difabel ini mempunyai agenda pertemuan rutin setiap bulan yang di isi Pengetahuan tentang difabelitas, Advokasi, Gender dan Kesehatan Reproduksi. Selain itu juga ada pelatihan ketrampilan mulai memasak ( buat Roti, kripik tempe dsb) serta pengelolaan keuangan kelompok maupun usaha, sehingga saat ini mereka sudah sangat mandiri dalam berorganisasi maupun bersosialisasi.

### 3 Membuka Jaringan dengan Stakeholder

Dari kelompok ini pengurus berjejaring dengan dinas yang ada dibantu (Dinsos, Disnakertrans, Disperindakop dan KPPdan KB serta pemerintah desa) sehingga anggota bisa mendapat kursus ketrampilan juga bantuan alat untuk usaha baik perseorangan maupun kelompok. Dari usaha yang dijalankan barengan yaitu menerima pesanan snack akhirnya bisa menambah penghasilan keluarga membantu suami.

### 4. Meningkatkan Usaha mandiri

Kelompok perempuan Jetis 25% pengguna kursi roda, tapi mereka tetap saja semangat melakukan usaha ekonomi produktif seperti, buka warung kelontong, menjahit, menerima pesanan snack, berternak (ayam, lele, kambing) dan hasilnya bisa untuk menambah pemasukan keluarga yang modal mereka peroleh dari lembaga Keuangag Mikro ( LKM ) yang mereka kelola secara swadaya.

### 5. Memulihkan kepercayaan keluarga dan masyarakat

Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi perempuan difabel kini tidak lagi menjadi beban keluarga, sekarang mereka sudah bisa bangkit berperan aktif membantu keluarga. Semua itu karena mereka mau keluar dari rumah mencari pengetahuan baru, awalnya mereka bergaul dengan sesama difabel. Karena didalam pertemuan bulanan banyak pengetahuan yang mereka peroleh mereka tidak canggung beraktifitas di masyarakat dan mendapat kepercayaan.

### 6. Sarana Advokasi hak-hak difabel

Setelah berkumpul dan mendapat pengetahuan mengenai hak asasi, kini mereka sudah berani mengadvokasi sendiri apa yang menjadi hak-haknya baik itu dibidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya. Sudah saatnya untuk bangkit menyongsong masa depan yang lebih baik, tidak ada untungnya merenungi keadaan dan hanya mengharapkan bantuan. Mereka berjejaring dengan organisasi difabel yang lain di wilayah Bantul untuk bersama berjuang memperbaiki tingkat kehidupan yang layak. Dengan organisasi maka kita memiliki alat perjuangan yang solid dalam rangka pemenuhan hak-hak kita, organisasi akan maju apabila ada kesadaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila bersama-sama. Semoga Organisasi Perempuan difabel Jetis dan Bambanglipuro menjadi inspirasi Perempuan difabel yang lain. Amin ( Tari )

## Peran Perempuan Menurut Pasal 6 CRPD dan UU No.19 th 2001

Saat ini, terdapat 146 negara penandatanganan Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD), 89 penandatanganan Optional Protocol, 90 ratifikasi terhadap Konvensi dan 57 ratifikasi Protokol. Namun, sangat disayangkan bahwa Indonesia termasuk negara yang hanya dapat menandatangani dan belum meratifikasi. CRPD menyatakan bahwa harus ada perubahan paradigma terkait orang dengan disabilitas. Konsep bahwa orang dengan disabilitas adalah "obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial" menjadi pandangan bahwa orang dengan disabilitas sebagai subyek penyandang hak yang mampu memperjuangkan hak-haknya dan mampu membuat keputusan atas hidupnya berdasarkan kebebasannya sendiri sebagai anggota masyarakat aktif. CRPD mengakui bahwa setiap orang dengan segala jenis disabilitas harus dapat menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Pertanyaan muncul pada tahap implementasi. Indonesia memiliki beberapa peraturan dan juga Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyangkut penyandang disabilitas dan hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan kedua undang-undang tersebut terhadap pemenuhan hak orang dengan disabilitas masih jauh dari sepenuhnya. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas. Undang-undang tersebut mengandung berbagai hak terkait penyandang disabilitas, yakni dalam bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan sosial secara setara. Bahkan, secara khusus dalam konteks peran perempuan difabel yang berbunyi: Pasal 6 Perempuan penyandang cacat : 1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa perempuan dan anak-anak perempuan penyandang cacat menjadi subyek diskriminasi berganda dan oleh karenanya harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka secara penuh dan setara. 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan penuh perempuan, dengan tujuan memberikan jaminan bagi mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakui dalam Konvensi ini.

Namun pada kenyataannya semua itu hanyalah sebagai pemikiran saja, tanpa adanya realisasi yang nyata dari semua pihak, jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang mempunyai kewenang tersebut mewujudkan dengan nyata, atau jika menelisik lebih jauh lagi pada pasal Pasal 19 Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat : Negara-negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang setara bagi semua orang penyandang cacat untuk hidup dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang sama dengan orang-orang lainnya, dan harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan layak untuk memfasilitasi menikmati penuh orang-orang penyandang cacat atas hak ini dan keterlibatan mereka dalam komunitas, termasuk dengan menjamin bahwa:

- Orang-orang penyandang cacat memiliki kesempatan untuk memiliki tempat tinggal mereka dan di mana serta dengan dengan siapa mereka bertempat tinggal atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, serta tidak dipaksa untuk bertempat tinggal dalam suatu pengaturan tempat tinggal yang khusus;
- Orang-orang penyandang cacat memiliki akses atas sejumlah pelayanan dukungan dalam-rumah (*in-home*), residensial, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan personal yang diperlukan untuk menyokong kehidupan mereka dan keterlibatan dalam komunitas, serta untuk mencegah isolasi atau segregasi dari masyarakat;
- Pelayanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia atas dasar kesetaraan bagi orang-orang penyandang cacat dan harus responsif terhadap kebutuhan mereka.

Semoga dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh difabel, pemerintah harus menjamin hak-hak penyandang cacat yang diatur di dalam Konvensi, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

( Redaksi & Berbagai Sumber )

**DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: [totokrawidjati@gmail.com](mailto:totokrawidjati@gmail.com) Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi Perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama**

## Berbeda Bukan Untuk Dibedakan

Menjadi perempuan dengan *different abilities* (*Difabel*) atau *disabilities* tidaklah mudah. Seringkali para perempuan difabel ini harus menghadapi diskriminasi berlapis. Pertama, karena ia perempuan. Kedua, karena ia *disable/*peyandang cacat. Perlakuan tidak adil harus mereka terima karena mereka berbeda. Mereka dipandang sebelah mata, dianggap manusia yang tidak sempurna. Jangankan persamaan kesempatan, diperlakukan secara wajar pun tidak.

Angkie Yudistia adalah salah satu perempuan yang berhasil menghadapi tantangan diskriminasi berlapis tersebut. Ia tuna rungu sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Namun, Angkie membuktikan pada dunia bahwa keterbatasannya bukanlah batasan untuk menjadi sukses. Ia menyelesaikan studi S1 dan S2-nya dengan gemilang. Tahun 2008 Angkie terjun ke dunia model dengan menjadi finalis Abang None Jakarta. Ia juga terpilih sebagai *The Most Fearless Female Cosmopolitan* 2008. Saat ini, ia bekerja sebagai *Corporate Public Relation* di sebuah perusahaan *Oil and Gas* di Jakarta. Selain itu ia juga aktif membantu Yayasan Tuna Rungu SEHJIRA, sering menjadi pembicara untuk isu difabel, dan kini ia pun sedang dalam proses menerbitkan buku yang berisi *sharing experience*-nya sebagai seorang perempuan difabel.

Tapi, jangan dikira ia tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Sejak dokter menvonisnya tuna rungu, diskriminasi merupakan makanan sehari-hari baginya. Ketika kecil ia sempat mengalami krisis kepercayaan diri karena keadaannya tersebut. Teman-teman sebaya Angkie sering mengejek menyebabkan kurangnya kepercayaan diri. Namun hal tersebut tidak dibiarkannya berlarut-larut. Ia sadar bahwa ia memiliki kekurangan. Tapi, ia tidak mau memandang kekurangannya sebagai aib. Ia tidak boleh malu dengan keadaannya. Sejak itu Angkie mulai kembali ceria dan percaya diri. "Ya, saya sadar jika kita ingin diterima oleh orang lain, kita harus menerima diri kita sendiri terlebih dahulu. Diskriminasi itu ada, dan memang akan selalu ada. Permasalahannya terletak di bagaimana kita menghadapi diskriminasi itu," demikian kata perempuan berusia 24 tahun tersebut. Ia juga sempat mengalami penolakan oleh beberapa perusahaan karena keterbatasan fisiknya. "Saya pernah tidak diterima kerja hanya karena saya tidak bisa menggunakan telepon,"



Foto Google

Namun ia tidak mau menyerah. Angkie percaya bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Ia tidak mau terlalu terpuruk. Ia memilih untuk berpikir positif dan mencari solusi masalahnya dibanding terus meruntuki keadaan. Melihat besarnya diskriminasi terhadap para difabel perempuan, Angkie tergugah untuk mengubah keadaan. Ia kemudian bergabung dengan Yayasan Tuna Rungu Sehjira untuk membantu tuna rungu lain sekaligus memperjuangkan kesetaraan tuna rungu. Penggunaan istilah difabel (*different ability*) merupakan salah satu bentuk kesetaraan. Sebutan ini jauh lebih ramah dibanding terminologi cacat. Ia berharap penggunaan istilah difabel lebih dipopulerkan dan dikembangkan. Namun, ia tetap menekankan bahwa bukan hanya terminologi yang diubah, tapi juga **cara pandang**. "Masyarakat harus lebih *aware*, lebih memahami bahwa tidak semua orang sempurna. Hal tersebut sangat manusiawi. Pada dasarnya difabel butuh dibantu, tapi bukan untuk dikasihani. Ya, difabel itu memang berbeda, tapi bukan untuk dibedakan. Kalo perlu dibantu, bantulah! Namun anggaplah kita semua sama. Difabel juga bagian untuk masa depan. Jadi, ubah persepsi buruk tentang mereka dan tanamkan persepsi yang positif," ujar Angkie bijak.

Angkie berharap para difabel tidak terlalu terperangkap dengan pemikiran mereka yang tidak bisa apa-apa karena mereka cacat. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Terimalah kekurangan dengan lapang dada dan tingkatkan segala potensi yang ada. Semua manusia setara, jangan merasa lebih rendah dari orang yang lebih sempurna secara fisik. Malah, ketidak-sempurnaan fisik yang dimiliki Angkie membuatnya merasa menjadi manusia yang jauh lebih sempurna dan menghargai kehidupan. "Dengan keadaan seperti ini aku bisa lebih bersyukur kehidupan aku. Aku sadar hidup itu cuma sekali. Hiduplah seakan-akan besok kita belum tentu kita hidup. Jadikan tiap hari cerita yang indah!" kata Angkie dengan senyum mengembang.

( *Jurnal Perempuan* Oleh: *Shintiya* 18 July 2011 )



Foto Jurnal Perempuan

## Menjadi Difabel Bukan Hambatan Untuk Berkarya

Perempuan berusia 37 tahun itu, dengan tekun dan berlahan-lahan merajut kain payet yang sudah hampir jadi, ibu Pur panggilannya dengan telaten ketika jari-jarinya merapikan bahan-bahan yang akan diolah, Ibu Purwanti yang beralamatkan di Karet Rt 01 Plered Kecamatan Plered Bantul ini begitu telitinya. Bu Pur juga seorang difabel akibat gempa 2006., Ibu Pur mengalami patah tulang pada kaki kirinya dan diplatina. Melihat **sekilas** memang tidak nampak jika Bu Pur adalah seorang difabel, ketika ditanya oleh redaksi Dfabel New's sejak kapan aktif dalam kegiatan social masyarakat, " wah sejak sebelum gempa mas" dulu sering aktif dalam kegiatan pengajian ibu-ibu di Masjid, ikut pertemuan organisasi kemasyarakatan" namun sejak terkena gempa dan harus banyak istirahat dirumah, ya kegiatannya membikin payet, untuk mengusir kesepian dan kejenuhan saja ' katanya.

Namun dari kejenuhan dan kesepian yang dialami oleh Bu Pur, malah menjadikan motivasi untuk lebih mandiri dan berkarya, dengan hasil karyanya payet, dari mulai itulah payetnya dikenal oleh banyak orang, dan bahkan Bu Pur juga masih aktif dalam kegiatan masyarakat walau masih dibantu dengan kruk selama kurang lebih 2 tahunan, tetapi sekarang sudah tidak memakai kruk lagi dan sudah bisa berjalan seperti biasa. Ditanya soal tanggapan masyarakat tentang dirinya, " tanggapannya ya baik, mereka tidak mengucilkan atau mendiskriminasi saya' justru saya di dorong untuk lebih semangat dan jangan menyerah " jawabnya. Ibu Purwanti mempunyai keahlian bikin payet dan bahkan dipercaya untuk mengajari para ibu-ibu tetangganya untuk bikin kerajinan payet, ada sekitar 20 orang yang pernah diajari untuk bisa bikin payet, " ya kan sayang kalau punya keahlian tidak ditularkan, saling tukar ilmu lah mas " terangnya.

Sejak saat itu sering diundang untuk melatih ibu-ibu disekitar tempat tinggalnya, disinggung soal peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam hubungan masyarakat, Ibu Pur menjawab " saya juga dulu aktif di lembaga SAPDA, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di SAPDA, ini juga menjadi bekal untuk saya kedepannya " menambah pengetahuan tentang banyak hal mas, ya tahu hak-hak difabel, kesehatan reproduksi, gender " katanya jelas. Harapan kedepannya apa yang di inginkan untuk perempuan difabel. Bagi ibu Pur menjadi Difabel bukan sebuah halangan untuk maju, jika kita mau berusaha dan punya niat pasti semua ada jalannya, dan merasa tidak malu, tho semua kita kembalikan pada Tuhan, sebab hidup mati rejeki dan apapun yang terjadi semua tergantung pada Allah, kita sebagai manusia tinggal menjalani saja. ( Redaksi )



### DARI HAL : 2 : Jangan Sepelekan.....

Sehingga, stigma perempuan sebagai "tiang wingking" atau penerima keputusan saja, masih melekat erat. Untuk itu, perlu upaya terus menerus dalam penyadaran bahwa hak partisipasi laki-laki dan perempuan adalah setara selain faktor tenaga fisik, faktor budaya juga turut membebani perempuan untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan fisik. Asumsi bahwa perempuan adalah "makhluk halus", yang hanya sesuai dengan pekerjaan "halus-halus" pula, ditambah pertimbangan kepatutan menurut masyarakat setempat, telah memberikan sekat yang jelas bahwa pekerjaan lingkungan fisik/infrastruktur adalah domain kaum laki-laki.

Dengan aktifitas yang telah dilakukan aktivis perempuan difabel dan hasil yang telah diperoleh tidak ada alasan untuk menyepelekan ( meremehkan) peran perempuan difabel di kehidupan social, fisik boleh berbeda kemampuan bisa andalkan. Di tingkat bawah KUBE sebagai sel dari Pemberdayaan difabel di tingkat masyarakat menjadi wadah bagi komunitas difabel untuk bersama-sama keluar dari jeratan kemiskinan. Dengan diversifikasi kegiatan yang beragam, mulai dari kegiatan lingkungan yang berorientasi pada pembangunan fasilitas umum lingkungan tempat tinggalnya, kegiatan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan keluarga serta kegiatan sosial yang berorientasi sebagai jaring pengaman komunitas difabel yang belum berdaya, Paguyuban SEHATI Sukoharjo telah menunjukkan bentuk komitmen pemberdayaan difabel yang mengedepankan pengarusutamaan difabelitas ( difabel mainstreaming) dan gender (gender mainstreaming) Dengan demikian, harapan dapat diperoleh gambaran bahwa perempuan telah diakomodir oleh Program pemberdayaan Difabel. Maka, bukanlah sekedar impian semu jika perempuan diharapkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan hak difabel. Meski tanpa Nobel, tanpa penghargaan ataupun sambutan seremonial, perempuan difabel adalah pahlawan keluarga. (Edy Supriyanto)



## Kemampuan Perempuan Difabel

Namanya Ratna perempuan berusia 35 tahun. Yang tinggal di Dusun Jomblang RT 01/29 Sendang Mlati Sleman adalah sosok perempuan yang mandiri, perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, adalah seorang perempuan difabel, namun semua itu tidak membuat dia minder atau putus asa, dengan keadaan yang dialaminya, membuat dia tetap semangat dan pantang menyerah. Ketika team redaksi Difabel News bertanya soal peran perempuan difabel dalam kegiatan sosial masyarakat, Ratna dengan penuh semangat menceritakan pengalaman yang pernah dilewatinya.

Ketika ditanya sejak kapan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. “ Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat kurang lebih sejak 4 tahun lalu, sejak saya kenal komunitas difabel, dan saat itulah ada panggilan dari hati saya untuk menjadi seorang aktifis atau volunteer bagi difabel “ terangnya. Apa yang melandasinya terjun dalam dunia aktifis Ratna menambahkan “ Karena rasa syukur saya akan nikmat yang telah diberikan Allah pada saya, yang mana kekurangan yang ada pada diri saya masih jauh lebih baik dibandingkan teman-teman saya yang lain, maka tanpa ijin dari siapapun termasuk suami, saya bertekad untuk mengabdikan diri saya pada komunitas difabel, hingga saya masuk di PPCS dan menjadi aktifis disana, Dan Alhamdulillah sosok suami saya yang non difabel ikhlas dan sangat mendukung semua kegiatan saya, sehingga semua bisa saya lakukan tanpa kendala dari keluarga saya, walau kadang saya harus meninggalkan kewajiban saya **mengasuh dan merawat 3 orang anak” katanya mantap.**

Disinggung soal kendala apa yang sering hadapi pada setiap kegiatan di masyarakat ; Ratna lebih jauh lagi menerangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu :

- Adanya stigma negatif di masyarakat tentang difabel yang hanya merepotkan, sehingga tampak sekali adanya diskriminasi difabel, memang diberi kesempatan tetapi selalu yang paling akhir bila masyarakat non difabel sudah lebih dulu mencoba atau diberi kesempatan.
- Birokrasi yang sulit sehingga dengan susah payah, sesuai kemampuan, saya harus bolak balik dan putar-putar dari satu kantor ke kantor lain atau satu lokasi ke lokasi lain, untuk mencapai yang kami harapkan.
- Ketidakpercayaan masyarakat pada saya akan kemampuan dan kapasitas yang saya miliki, sebelum saya bisa menunjukkannya

Lalu langkah atau tindakan apa untuk menyikapi persoalan yang sering hadapi di masyarakat?

Saya tidak banyak bicara tetapi menunjukkan bukti, bahwa saya bisa dan mampu seperti orang lain, walaupun saya punya kekurangan, karena saya yakin tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, dibalik kekurangan saya pasti ada suatu kelebihan yang orang lain tidak punya”.



Apakah ada lembaga lain yang mempepori tentang gerakan perempuan difabel agar mengambil peran dalam masyarakat?

Ya memang ada pihak-pihak lain yang mendukung gerakan Perempuan difabel. Contohnya, ya Lembaga Sapda sendiri mengadakan sekolah untuk Perempuan dan Perempuan Difabel yang tujuannya untuk mentransformasi pemahaman secara detail tentang issue Difabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi, sehingga itu sangat membantu meningkatkan kapasitas perempuan dan **dalam upaya mendukung gerakan perempuan difabel”.**imbuhnya.

Apa yang sudah dikerjakan selama ini dalam peran social masyarakat?

Adapun yang sudah saya kerjakan untuk menunjukkan bahwa perempuan difabel bisa bergerak dan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat misalkan :

- Membantu mengadvokasi, mendampingi dan melakukan reveral pada teman difabel sendiri maupun masyarakat umum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
- Bagi teman difabel, saya akan bantu mereka mengupayakan untuk mendapatkan mobility aid atau alat bantu sesuai dengan yang dibutuhkan dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti Dinsos, Dinkes, UCP, CIOAL dan lembaga lainnya.
- Bagi yang membutuhkan pendampingan dalam kepengurusan jaminan kesehatan, saya juga siap membantu, tentunya ini juga tidak terlepas dari lembaga SAPDA yang selama ini membantu dalam pengkaveran jamkesmas.
- Selain itu saya bersama teman-teman aktifis lain di PPCS menjembatani mereka untuk bisa sekolah dan mendapatkan vocational training guna masa depan mereka mencapai kemandirian, dengan cara pendampingan pelatihan sampai Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan upaya penguatan modalnya, semua itu berkat kerja sama kami dgn SKPD terkait.

Apa harapan kedepan untuk kemajuan dan kemandirian perempuan difabel?

Ratna menambahkan “ Janganlah kondisi kekurangan kita menjadi kendala untuk maju dan mandiri, jangan putus asa dan terus semangat. Selama masih ada kesempatan jangan malu untuk tetap terus belajar guna peningkatan kapasitas demi **terwujudnya kemandirian kita kaum perempuan”.** Dan semoga Harapan saya kepada lembaga sapda untuk tidak bosan dalam membimbing, mendampingi dan mengadakan sekolah perempuan lagi, bagi yang kemarin belum bisa mengikuti agar bisa menjadi bekal perempuan difabel mencapai kemajuan dan kemandirian seperti yang kami harapkan. ( Tri )



## Peran Perangkat Desa Dalam Pemberdayaan Difabel

Peran perempuan difabel ditingkat pemerintahan dalam hal ini ditingkat Kelurahan misalnya, dirasa masih kurang, ini dengan dibuktikan bahwa masih banyak yang mesti dibenahi, baik secara individu maupun secara kelembagaan ditingkat kelurahan berikut ini hasil wawancara dengan lembaga pemerintahan tingkat Kelurahan, yaitu kelurahan Patangpuluhan. Kecamatan Wirobrajan. ditanya soal peran perempuan difabel dalam kegiatan social masyarakat, Ibu Lurah Dra **Erna Setyaningsih menjawab “ Kalau dalam artian begini, kalau realitas sesungguhnya memang kami belum pernah memberdayakan secara langsung, tetapi ini tidak menutup kemungkinan karena yang dimaksud pemerintahan disini adalah ditingkat kelurahan tentunya akan kita sharingkan dengan lembaga-lembaga yang ada dan nanti kegiatan-kegiatan apa yang sesuai dengan difabel khususnya perempuan yang nanti akan kita sharingkan disitu.**

Lalu bagaimana pihak kelurahan melihat kemampuan perempuan difabel selama ini?

Kalau untuk di Patangpuluhan sedikit banyak kalau saya melihat, kebetulan kita yang perempuan yang usia pekerja jarang ya namun sebenarnya perempuan secara umum biasanya lebih potensial untuk hal ketekunan, sebenarnya kita terbuka dan bisa kita kembangkan potensinya, cuma mungkin lebih ke koordinasi yang perlu kita tingkatkan informasi dan koordinasi itu yang **memang perlu kita intensifkan.” jelasnya.**

Bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini kelurahan menghadapi banyaknya persoalan difabel terutama difabel perempuan ?

Saya menjawabnya dilingkup kecil aja ya. kalau selama ini ditingkat kelurahan kebetulan di Patangpuluhan sendiri untuk difabel Perempuan tidak terlalu banyak, dan kebanyakan masih dibawah umur dan masih dalam pendampingan kita penekanannya lebih kepada keluarga, keluarga yang mempunyai difabel terutama ibu, bagaimana dia mendampingi anak-anaknya yang berkebutuhan khusus, toh sekarangpun kalau program yang ada sebenarnya sudah ada dari mulai seseorang itu difabel ? bagaimana kita memperlakukan difabel dibawah umur, kemudian kalau yang sudah usia sekolah, di Patangpuluhan memang ada beberapa, tetapi saya pikir masih dalam bentuk perhatiannya bagus dan pendampingan dari keluarga juga bagus dan kemudian kita juga selalu mengusahakan bantuan apa yang sebenarnya dibutuhkan. kalau selama ini menangan alat bantu dengar, memang yang menjadi kendala adalah anak-anak yang mental agak susah untuk mengkoordinasikanya bagaimana. Dalam pendampingan keluarga, berarti yang dilatih keluarganya, dulu pernah kita mereka dilibatkan dalam pelatihan tetapi yang bersangkutan sendiri kadang-kadang yang tidak mau..

Pelatihanya adalah bagaimana untuk meningkatkan perekonomian dan pendamping, itu juga perlu kalau selama ini masih secara umum kalau mempunyai anak yang berkebutuhan khusus itu bagaimana cara pendampingan dan mendidiknya, kita akan sharingkan disitu. Tapi kalau yang diwilayah patangpuluhan sangat kecil kita tekankan disini adalah kita, karena selama ini kita dekat Sapda coba kita sharingkan lagi dan kalau diwilayah kebetulan ada salah satu warga yang mempunyai kepedulian difabel dan dia mau mempekerjakan para difabel tapi **dalam lingkup yang kecil.” terang ibu Lurah**

Secara social kita terbuka dalam setiap kegiatan yang bisa diikuti baik dari segi sosial kamasayarakan dari sisi olah raga, kesehatan, ekonomi bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian kita ingin mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga ditingkat kelurahan, dan biasanya yang dikoordinirkan ditingkat kota.. tapi untuk ditingkat kecamatan masih sangat sedikit. Kendala dari sisi keluarga kadang-kadang justru tidak mau membuka akses, kita sudah membuka kesempatan, tetapi dari yang bersangkutan sendiri yang menutup akses meskipun ada kesempatan bantuan yang ada kendalanya kalau ada salah satu keluarga justru tidak difungsikan untuk kedifabelnya tetapi justru kepada yang lain itu yang perlu pendampingan dan dalam pendampingan tidak harus kami tetapi kami punya lembaga dari **masyarakat sendiri yang peduli salah satunya IKPSM”.** Imbuh Bu Lurah.

Lalu bagaimana tanggapan masyarakat jika ada perempuan difabel yang berperan aktif dalam kegiatan kemasayarakatan dilingkungan setempat?

Tidak masalah selama mereka mampu mengerjakan, terangnya.

Program apa saja yang selama ini bisa mendukung peran aktif perempuan?

Dari pemerintah sudah membuat program dan dari penerima itupun aksesnya terbuka, mari bersama dikoordinasikan atau di informasikan secara baik sampai kepada mereka, karena selama ini kalau ditingkat kelurahan belum pernah ada paguyuban atau komunitas, sehingga kita bisa saling mengkomunikasikan dengan baik apa sih yang sebenarnya mereka **inginkan dalam peran sosial masyarakat”.** Program terhadap mereka, kepedulian terhadap mereka harus tetap, ada dengan melihat kemampuan sebenarnya yang cocok untuk mereka itu apa? Tetapi itu tidak mudah dan harus dicoba, harus ada informasi timbal balik dari berbagai pihak informasi dan yang jelas harus mempunyai data yang valid sehingga bisa mengetahui persis apa kebutuhan mereka disesuaikan dengan kiprah mereka ataupun partisipasi mereka didalam masyarakat itu yg penting sehingga masyarakatpun tidak serta merta selalu memandang remeh dan kemampuan mereka juga sangat luar biasa kalau dikembangkan potensinya. ( Ju2 )